

**KOLABORASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN PASCA BENCANA BANJIR
DI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Agung Prasetio

NPP. 31.0042

Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi: Manajemen Keamanan Dan Keselematan Publik

Email: agungprasetio0188@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Selamat Jalaludin, S.Pi., S.H., M.M.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Government of Medan through the Regional Disaster Management Agency of Medan strives to provide life and livelihoods for disasters in order to create common well-being for the community. Of course, this is not going to go smoothly without a good collaboration between the government and the people themselves. Purpose:* The purpose of this research is to determine the collaboration between the Regional Disaster Management Agency and the community in post-flood disaster management in Medan City, to find out the inhibiting factors and efforts to overcome obstacles to post-flood disaster management in Medan City. **Method:** This research employs a qualitative approach with an inductive method. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:** The results of this study show that the implementation of regional disaster management agency collaboration with the community has been well implemented. The obstacles to the implementation of this collaboration are the realisation of minimum budget, public awareness, limited means and resources. **Conclusion:** The conclusion of this research is that the collaboration was carried out well, but there were obstacles such as less than optimal budget realization, low public awareness of the environment, and limited facilities and infrastructure. To overcome this obstacle, it is recommended that there be outreach to increase environmental awareness, the formation of Disaster Resilient Villages in vulnerable areas, as well as updates to the management budget.

Keywords: *Collaboration, Disaster, Flood*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Kota Medan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan berupaya untuk memberikan kehidupan dan penghidupan atas bencana demi menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Tentunya hal ini, tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat pada penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan, mengetahui faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam

mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi badan penanggulangan bencana daerah dengan masyarakat telah terlaksana dengan baik. Hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kolaborasi ini adalah realisasi anggaran kurang maksimal, kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana terbatas. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah kolaborasi terlaksana baik, namun ada hambatan seperti realisasi anggaran yang kurang optimal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi hambatan ini, disarankan perlu dilakukan sosialisasi meningkatkan kesadaran lingkungan, pembentukan Desa Tangguh Bencana di area rawan, serta pembaruan dalam pengelolaan anggaran.

Kata kunci: *Banjir, Bencana, Kolaborasi*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rentan akan terjadinya bencana. Hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana. Keberadaan Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) dan pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik menjadi salah satu faktor penyebab yang membuat Indonesia menjadi wilayah rawan bencana (Risnawati K, 2020). Bencana yang sering terjadi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, kekeringan, dan bencana non-alam seperti kebakaran, wabah penyakit, serta bencana sosial seperti kerusuhan, dan konflik sosial (Detik.com, 2022).

Kondisi geologis, geografis, demografis, dan hidrologis Indonesia membuat negara ini memiliki potensi bencana yang tinggi. Bencana dapat disebabkan oleh faktor non-alam, faktor manusia, atau faktor alam, dan seringkali mengakibatkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan dampak psikologis yang dalam (Rakuasa et al., 2022). Setelah terjadinya bencana (pasca-bencana). Berbagai ketentuan pelaksanaan penanggulangan bencana diatur sesuai dengan undang-undang. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.

Provinsi Sumatera Utara ialah salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana. Salah satunya berada di ibukota provinsi yaitu kota Medan yang merupakan salah satu dari tiga kota terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta serta Surabaya. Medan mempunyai luas 26.510 hektar (3,6%) dari total luas Sumatera Utara (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2023). Kota Medan adalah salah satu pintu gerbang bagian barat Indonesia dengan Pelabuhan Belawan serta Bandara Internasional Kualanamu sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia (Permatasari & Hidayat, 2017).

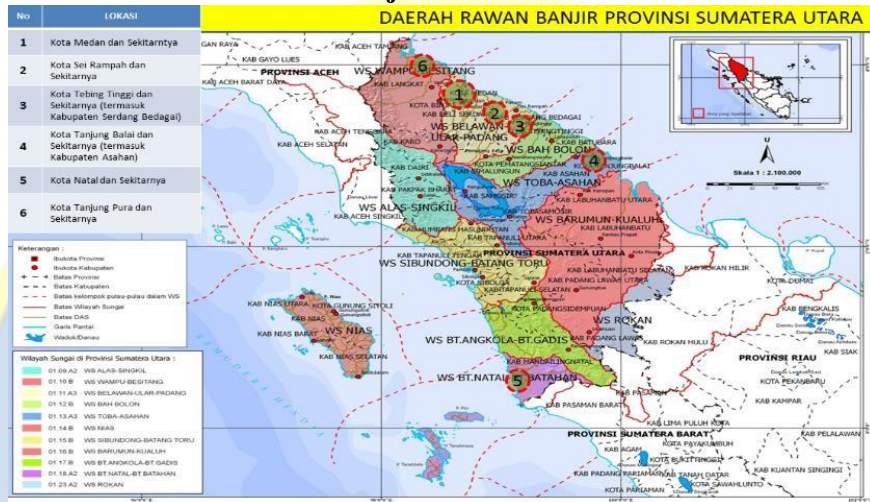
Banjir merupakan bencana alam yang sulit dihindari, terutama selama musim hujan. Kota Medan memiliki potensi bahaya banjir yang tinggi, dan terdapat 21 kecamatan yang berpotensi terdampak oleh banjir. Bencana banjir dapat menimbulkan kerugian materi, dampak psikologis, dan korban jiwa. Pada tahun 2020, sebanyak 5.965 jiwa terdampak banjir yang terjadi di empat kecamatan di Kota Medan yaitu Medan Johor, Maimun, Polonia, Helvetia, dan Amplas. Hal ini dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan meluapnya sungai Deli, Babura, serta Denai. Banjir juga dapat menghambat pertumbuhan dan mobilitas kota, serta berdampak negatif pada sektor-sektor lainnya (BNPB.go.id, 2020). Oleh karena itu, peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam

penanggulangan bencana, khususnya banjir, sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan berkaitan dengan permasalahan bencana banjir yang ada di Kota Medan. Gambar berikut merupakan peta daerah rawan banjir di Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1. 1
Peta Rawan Banjir Provinsi Sumatera Utara



Sumber: (SDA.go.id, 2020)

Dapat dilihat dari gambar diatas, Provinsi Sumatera Utara khususnya wilayah Kota Medan menjadi salah satu kota yang sering terjadi bencana banjir. Bencana banjir sering terjadi di kawasan Kota Medan dipicu oleh tingginya curah hujan dan banyaknya sungai. Dampak dari bencana di Kota Medan menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami kerugian dalam bentuk fisik maupun materi. Hal ini dikarenakan bencana tersebut terus berulang terjadi dan menjadi permasalahan di setiap tahunnya. Data selanjutnya merupakan jumlah kejadian bencana banjir tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1. 1
Jumlah Kejadi Banjir Tertinggi di Provinsi Sumatera Utara 2018-2020

KOTA	BENCANA BANJIR		
	2018	2019	2020
SIBOLGA	3	1	5
TANJUNG BALAI	5	-	-
PEMATANG SIANTAR	12	5	7
TEBING TINGGI	25	12	13
MEDAN	30	29	25
BINJAI	7	1	6
PADANG SIDIMPUAN	9	10	7
GUNUNG SITOLI	10	14	3

Sumber: (BNPB.go.id, (2020), diolah oleh penulis (2023)

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan banjir. Penelitian Herman, Andri Kurniawan, dan Demi Rezki yang berjudul "*Collaborative Governance* Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh" hasil penelitian menunjukkan bahwa, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan belum terciptanya kolaborasi yang maksimal antara instansi yang terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota Sungai Penuh dalam penanggulangan banjir (Kurniawan et al., 2023). Penelitian Alyaa Larasati Hasna dan Awang Darumurti yang berjudul "*Collaborative Governance* Dalam Mitigasi Bencana Banjir ROB Di Kota Pekalongan" hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk collaborative governance yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation diwujudkan kedalam beberapa program seperti kajian dan riset, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dan MCK Adaptif di wilayah Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Program tersebut telah berhasil mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh banjir rob (Hasna & Darumurti, 2023). Penelitian Bima Ade Prayoga Setiawan, Eka Yulyana, dan Lina Aryani yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara", hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyebab banjir di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, menunjukkan adanya penumpukan sampah di Ulu Sungai. BPBD Kabupaten Bekasi belum maksimal dalam pengendalian utama dan kepemimpinan fasilitatif, serta menghadapi hambatan legalitas dan proses kerjasama yang belum optimal. Kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat masih terbatas pada komunikasi jarak jauh, dan kerjasama dengan dinas PUPR menghadapi kendala dalam menemukan solusi tepat untuk mengatasi banjir (Bima Ade Prayoga Setiawan et al., 2021). Penelitian Bayu Anggara, Adam Idris, dan Nur Hasanah yang berjudul "Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Berau" hasil penelitian menunjukkan bahwa, penanggulangan

bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Berau berjalan cukup baik. Sebelum banjir, BPBD mengidentifikasi masalah, memetakan jalur evakuasi, dan melatih kesiapsiagaan. Saat banjir, BPBD mengarahkan Tim Reaksi Cepat (TRC), menyelamatkan dan mengevakuasi korban, melindungi kelompok rentan, dan memenuhi kebutuhan dasar. Setelah banjir, dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi (Anggara et al., 2019). Penelitian Triana Anggun, Roni Ekha Putera, dan Roza Liesmana yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan”, hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal, hal ini disebabkan masih tingginya tingkat ketergantungan masyarakat dan belum jelasnya tugas KSB Kecamatan Padang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat (Anggun et al., 2020). Terakhir, penelitian Hendra Irawan Umabaih, Nurliah Nurdin, dan Romli Arsyad yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kepulauan Sula” hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses kolaborasi belum berjalan baik, karena pemangku kepentingan seperti akademisi atau perguruan tinggi belum dilibatkan. Selain itu, kurangnya anggaran dan peralatan menyebabkan penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula tidak maksimal (Umabaihi et al., 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Terdapat perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Medan. Teori yang digunakan oleh penulis menggunakan teori proses dari *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash yang terdiri dari lima dimensi yaitu, Dialog Antar Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen pada Proses, Pemahaman Bersama, dan Dampak Sementara (Ansell & Gash, 2008).

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat pada penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan, mengetahui faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau fenomena dan kenyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2015).

Penulis mengumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan Simangungsong (Simangungsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap sembilan informan yang terdiri dari, Kepala Pelaksana BPBD Kota Medan, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan Masyarakat sebanyak lima orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanganan Pasca Bencana Banjir

3.1.1. Dialog Antar Muka

Dalam konteks kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Medan, dialog antarmuka yang melibatkan tatap muka langsung sangat penting untuk memahami permasalahan bersama dan memastikan keberhasilan kolaborasi. Pemerintah Kota Medan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan berbagai upaya untuk membentuk kolaborasi dengan masyarakat dan pihak swasta, seperti yang dilakukan dalam Rapat Forum Perangkat Daerah. Forum ini bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan rencana penanggulangan bencana.

Penelitian menunjukkan bahwa diskusi yang terjadwal dengan baik sangat penting, namun saat ini masih perlu adanya penjadwalan yang lebih jelas agar diskusi rutin dapat berlangsung efektif. Selain itu, rasa saling menghargai antar pihak yang terlibat dalam kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan. Keterlibatan aktif dan respons positif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan swasta, menunjukkan adanya rasa saling menghargai dan profesionalisme dalam menjalankan tugas masing-masing.

Observasi lapangan mengindikasikan bahwa transparansi dalam sistem penanggulangan bencana dapat membangun kepercayaan yang kuat. BPBD telah menunjukkan transparansi dalam menginformasikan kejadian bencana dan kondisi fasilitas, meskipun terdapat kekurangan dalam pengarsipan dan sosialisasi kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kolaborasi ini memerlukan dialog yang efektif, penghargaan antar pihak, dan transparansi sistem untuk mencapai tujuan bersama dalam mencegah dan menanggulangi bencana banjir di Kota Medan.

3.1.2 Membangun Kepercayaan dalam Proses Kolaborasi

Dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Medan, membangun kepercayaan antara pihak yang berkolaborasi adalah faktor krusial. Kepercayaan yang tinggi antar pihak meningkatkan keberhasilan kolaborasi, sementara kurangnya kepercayaan dapat menyebabkan kerjasama berumur pendek. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan berusaha membangun kepercayaan antara masyarakat dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran kolaborasi tanpa rasa curiga yang dapat memicu perselisihan.

BPBD telah melakukan dialog tatap muka dengan masyarakat untuk menemukan solusi atas masalah banjir yang sering terjadi. Dialog ini bertujuan untuk membuka komunikasi dan membangun kepercayaan dengan cara saling berbagi pengalaman dan masalah. Sosialisasi yang diikuti oleh masyarakat dan relawan menjadi sarana efektif untuk menciptakan komunikasi yang baik. Observasi menunjukkan bahwa komunikasi yang intensif, seperti apel gabungan yang melibatkan berbagai pihak, membantu membangun kepercayaan antar pihak.

Selain itu, keterbukaan dan transparansi antar pihak dalam kolaborasi sangat penting. BPBD melaporkan kendala yang dialami kepada masyarakat dengan harapan mereka dapat membantu sebagai relawan. Keterbukaan mengenai proses dan kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sarana

dan prasarana, memungkinkan masing-masing pihak untuk saling membantu menutupi kekurangan dan memanfaatkan kelebihan. Observasi menunjukkan bahwa transparansi dalam sistem dapat membangun kepercayaan yang baik, meskipun masih ada masalah dalam pengarsipan dan sosialisasi waktu penyelamatan (rescue time) kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kolaborasi yang efektif dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Medan membutuhkan dialog intensif dan transparansi untuk membangun kepercayaan yang kuat antara pihak yang terlibat.

3.1.3. Komitmen Bersama pada Proses Kolaborasi

Dalam upaya untuk mengatasi ancaman banjir yang kerap melanda Kota Medan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkolaborasi dengan masyarakat dan pihak swasta untuk menjalankan strategi pencegahan dan penanggulangan. Sebelum terbentuknya kolaborasi ini, terdapat koordinasi intensif antara BPBD, masyarakat, dan pihak swasta untuk menetapkan tujuan bersama dalam menghadapi musim hujan yang sering kali memicu banjir. Kolaborasi ini dilandasi oleh komitmen untuk saling mendukung dalam menanggulangi dampak buruk banjir bagi warga Kota Medan.

Faktor utama yang memperkuat kolaborasi ini antara lain adanya pengakuan bersama atas peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan banjir. BPBD secara aktif berkoordinasi dengan kelompok relawan dan pihak swasta seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kota Medan untuk menyediakan alat bantu evakuasi dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Hal ini menciptakan lingkungan di mana setiap pihak merasa dihargai dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama.

Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya membangun komitmen bersama tetapi juga memperkuat rasa saling ketergantungan antarpihak dalam menghadapi tantangan banjir yang kompleks. Observasi lapangan menunjukkan bahwa upaya ini tidak hanya efektif dalam penanganan bencana tetapi juga memperkuat hubungan antara BPBD, masyarakat, dan pihak swasta dalam menghadapi krisis bencana alam di Kota Medan.

3.1.4. Pemahaman Bersama Dalam Kolaborasi

Pemahaman bersama dalam kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), masyarakat, dan pihak swasta menjadi krusial dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini didasari oleh adanya persamaan tujuan di antara semua pihak yang terlibat, yakni untuk mencegah dan menanggulangi dampak buruk banjir. Tujuan kolaboratif ini menjadi landasan bagi koordinasi intensif antara BPBD, masyarakat, dan pihak swasta dalam menyusun strategi yang efektif.

Adanya kegiatan seperti apel gabungan dan sosialisasi telah membantu menyatukan pemikiran dan persepsi di antara para relawan masyarakat dengan BPBD. Melalui kegiatan ini, tercipta kesempatan bagi semua pihak untuk berkoordinasi dan menyamakan langkah dalam menghadapi tantangan banjir. Partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak swasta menunjukkan komitmen yang kuat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan bencana banjir yang kompleks di Kota Medan.

Dengan demikian, pemahaman bersama dalam kolaborasi ini tidak hanya memperkuat hubungan antarpihak, tetapi juga meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Hasil dari kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kota Medan dalam menghadapi ancaman banjir secara lebih efisien dan efektif.

3.1.5 Hasil Sementara dari Proses Kolaborasi

Hasil sementara dari proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Medan menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Meskipun kolaborasi telah dilakukan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), masyarakat, dan pihak swasta, namun hasil yang dapat terlihat masih belum mencakup secara menyeluruh dalam penanggulangan dan penanganan bencana banjir.

Salah satu hasil positif dari kolaborasi ini adalah adanya umpan balik yang positif antarpihak. Umpan balik ini berperan penting dalam mendukung kelancaran kolaborasi, terutama dalam situasi darurat seperti saat terjadinya banjir di Kecamatan Medan Belawan. Kolaborasi antara BPBD dan relawan masyarakat menunjukkan bahwa tanggapan yang cepat dan koordinasi yang baik dapat membantu dalam penanganan awal bencana, meskipun terdapat kendala logistik dan jarak yang perlu diatasi.

Selain itu, tanggung jawab yang saling dipikul antarpihak juga menjadi faktor penting dalam hubungan kolaboratif ini. Baik dari pihak perangkat daerah maupun masyarakat, kesadaran untuk berkontribusi dalam upaya kolaborasi terlihat melalui keikutsertaan dalam kegiatan apel gabungan kesiapsiagaan dan bantuan logistik. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kota Medan, misalnya, memberikan kontribusi berupa alat berat dan sembako sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan bencana banjir.

Namun demikian, meskipun telah terlihat adanya upaya kolaborasi yang nyata dalam bentuk kegiatan-kegiatan konkret seperti simulasi penanganan bencana, hasil dari proses kolaborasi ini masih perlu ditingkatkan. Penelitian dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa ada potensi untuk lebih mengoptimalkan kolaborasi ini, terutama dalam aspek penanggulangan yang lebih efektif dan responsif terhadap keadaan darurat. Dengan demikian, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, kolaborasi antar BPBD, masyarakat, dan pihak swasta dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Medan telah menunjukkan langkah-langkah positif dalam menyatukan upaya untuk mengurangi dampak buruk dari bencana tersebut.

3.2. Hambatan yang dialami dalam Kolaborasi Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan

Dalam upaya mengatasi bencana banjir di Kota Medan, ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses penanganan dan pencegahannya. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan, yang menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan. Hal ini dikonfirmasi dalam hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada tanggal 18 Januari 2024, di mana terungkap bahwa alokasi anggaran yang tidak memadai membatasi

kemampuan untuk melakukan kegiatan operasional secara optimal, termasuk dalam hal penyuluhan, sosialisasi, dan penanganan langsung di lapangan.

Selain itu, kendala lain yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, yang tercermin dalam perilaku pembuangan sampah sembarangan. Kebiasaan ini mengakibatkan tersumbatnya saluran air dan memperburuk dampak banjir saat curah hujan tinggi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga menyoroti bahwa masalah kesadaran ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya genangan air yang signifikan saat musim hujan.

Melalui observasi dan hasil wawancara, diketahui bahwa faktor-faktor penghambat ini mempengaruhi efektivitas kolaborasi antarpihak dalam penanggulangan bencana banjir. Meskipun demikian, harapannya adalah agar seluruh pihak yang terlibat dapat lebih aktif dan responsif dalam menangani kendala-kendala ini, serta bersedia untuk saling mendukung dan menutupi kekurangan yang ada demi meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan dan pencegahan bencana banjir di Kota Medan.

3.3. Upaya untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Banjir di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat penanggulangan bencana banjir di Kota Medan, kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat sangat diperlukan. Beberapa upaya telah diidentifikasi sebagai langkah untuk meminimalisir hambatan tersebut. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi dan kegiatan reboisasi dengan jenis tanaman yang mampu menyerap air dengan cepat, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga fungsi sungai dan selokan sebagai jalur aliran air. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tanggal 18 Januari 2024, yang menunjukkan upaya untuk mengurangi dampak banjir dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat.

Selain itu, upaya lainnya mencakup peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk memperkuat penanganan bencana banjir. Pembentukan posko desa tangguh bencana juga diinisiasi sebagai langkah konkret untuk membantu masyarakat terdampak, khususnya di wilayah Medan Belawan yang rawan genangan banjir akibat curah hujan tinggi dan letaknya yang dekat dengan laut. Langkah ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai upaya untuk memudahkan evakuasi dan bantuan kepada masyarakat terkena dampak banjir.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Selama melaksanakan penelitian penulis telah menemukan hal yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana temuan penelitian penulis adalah kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Masyarakat Kota Medan telah terlaksana dengan baik. Hal ini berbeda dengan dengan penelitian Herman, Andri Kurniawan, dan Demi Rezki bahwa, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan belum terciptanya kolaborasi yang maksimal antara instansi yang terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota Sungai Penuh dalam penanggulangan banjir (Kurniawan et al., 2023). Kemudian penelitian dari Bima Ade Prayoga Setiawan, Eka Yulyana, dan Lina Aryani menemukan bahwa, BPBD Kabupaten Bekasi belum maksimal dalam pengendalian utama dan kepemimpinan fasilitatif, serta menghadapi hambatan legalitas dan proses kerjasama yang

belum optimal. Kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat masih terbatas pada komunikasi jarak jauh, dan kerjasama dengan dinas PUPR menghadapi kendala dalam menemukan solusi tepat untuk mengatasi banjir (Bima Ade Prayoga Setiawan et al., 2021).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terdahulu mengenai kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan masyarakat dalam penanganan pasca bencana banjir di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disimpulkan bahwa kolaborasi tersebut telah terlaksana dengan baik, terukur dari aspek proses collaborative governance seperti dialog antar muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan dampak sementara. Namun, terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam kolaborasi tersebut, antara lain realisasi anggaran yang kurang maksimal, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

Upaya yang direkomendasikan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi pengadaan sosialisasi dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, pembentukan Desa Tangguh Bencana di area yang rentan, serta pembaruan terhadap pengelolaan anggaran. Selanjutnya, disarankan agar Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan meningkatkan peran aktifnya dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan pihak swasta serta memperhatikan dukungan penuh dari pemerintah Kota Medan terhadap proses penanggulangan bencana banjir, khususnya terkait alokasi anggaran untuk efektivitas penanganan bencana yang lebih baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kolaborasi dalam penanganan bencana banjir di Kota Medan agar dapat memberikan masukan yang lebih luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Medan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, B., Idris, A., & Hasanah, N. (2019). Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Berau. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 879–890.
- Anggun, T., Putera, R. E., & Liesmana, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 123–137. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i2.2415>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Badan Pusat Statistik Kota Medan.* (n.d.). Retrieved October 10, 2023, from <https://medankota.bps.go.id/indicator/23/88/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Bencana, B. N. P. (2020). *Badan Nasional Penanggulangan Bencana.* <https://bnpb.go.id/berita/5-965-jiwa-terdampak-banjir-kota-medan>
- Bima Ade Prayoga Setiawan, Yulyana, E., & Aryani, L. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP>, 7(1), 168–175. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5746176>
- Detik.com. (2022). *Apa itu Ring of Fire? Penyebab Indonesia Rawan Dilanda Gempa.* <https://news.detik.com/berita/d-6444291/apa-itu-ring-of-fire-penyebab-indonesia-rawan-dilanda-gempa>
- Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 25–37. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210>
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1–18.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.* (n.d.).
- Permatasari, C. R., & Hidayat, S. (2017). Penerapan Konsep Airport Mall Pada Bandara: Studi Kasus Bandara Kuala Namu Medan Sumatera Utara. *Narada Jurnal Desain Dan Seni*, 4(3), 345–359. <http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/narada/article/view/3232/1785>
- Rakuasa, H., Sihasale, D. A., Mehdila, M. C., & Wlary, A. P. (2022). Analisis Spasial Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon. *Jurnal Geosains Dan Remote Sensing*, 3(2), 60–69. <https://doi.org/10.23960/jgrs.2022.v3i2.80>
- Risnawati K. (2020). ANALISIS MITIGASI BENCANA BANJIR DI PERUMAHAN SWADAYA MAS KELURAHAN BATUA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR Risnawati K. *Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 9, 9–17. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/planomadani>
- SDA.go.id. (2020). *No Title.* <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera2/peta-rawan-banjir-sumatera-utara-2/>
- Simangungsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan.* Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Umabaihi, H. I., Nurdin, N., & Arsyad, R. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9936>